



Benchmarking Implementasi Moderasi Beragama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Mata Pelajaran PAI di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2.

Agung Wibosono,¹ Wahab²

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

agungmumu090502@gmail.com¹, abdulwahabassambasi@gmail.com²

Korespondensi penulis: agungmumu090502@gmail.com

Abstract.

Strengthening religious moderation in Islamic education is a strategic issue amid increasing diversity challenges. However, the internalization of these values still tends to be normative and has not been systematically integrated in learning and quality assurance systems. This study aims to analyze the implementation of religious moderation in Islamic Religious Education learning and the effectiveness of the quality assurance system in supporting the internalization of these values in Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation, with research subjects including madrasah heads, teachers, and quality assurance teams. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of religious moderation has been attempted in the learning process, but it is still implicit and has not been structured in the learning tool. The quality assurance system that runs tends to be administratively oriented and has not accommodated substantive indicators that measure the moderate attitude of students. In addition, there are structural obstacles in the form of limited pedagogical capacity of teachers and a lack of policy support and external collaborative networks. Based on these findings, madrasahs are in the early stages of development in the integration of religious moderation, so strategic steps are needed in the form of constructing affective-based quality indicators, strengthening human resource capacity, developing institutional partnerships, and preparing operational and sustainable internal policies. The implications of this study confirm the importance of transforming the quality assurance system from an administrative orientation to a substantive approach to realize moderate and contextual religious education.

Keywords: Benchmarking of religious moderation, quality assurance, PAI learning

Abstrak.

Penguatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam menjadi isu strategis di tengah meningkatnya tantangan keberagaman. Namun, internalisasi nilai tersebut masih cenderung normatif dan belum terintegrasi secara sistematis dalam pembelajaran dan sistem penjaminan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta efektivitas sistem penjaminan mutu dalam mendukung internalisasi nilai-nilai tersebut di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian meliputi kepala madrasah, guru, dan tim penjaminan mutu. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama telah diupayakan dalam proses pembelajaran, namun masih bersifat implisit dan belum terstruktur dalam perangkat pembelajaran. Sistem penjaminan mutu yang berjalan cenderung berorientasi administratif dan belum mengakomodasi indikator substantif yang mengukur sikap moderat peserta didik. Selain itu, terdapat kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas pedagogis guru serta minimnya dukungan kebijakan dan jejaring kolaboratif eksternal. Berdasarkan temuan tersebut, madrasah berada pada tahap awal pengembangan dalam integrasi moderasi beragama, sehingga diperlukan langkah strategis berupa rekonstruksi indikator mutu berbasis afektif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kemitraan kelembagaan, serta penyusunan kebijakan internal yang operasional dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi sistem penjaminan mutu dari orientasi administratif menuju pendekatan substantif guna mewujudkan pendidikan agama yang moderat dan kontekstual.

Kata kunci: Benchmarking moderasi beragama, penjaminan mutu, pembelajaran PAI

Received May 03, 2026; Revised June 12, 2026; June 30, 2026

*Corresponding author, e-mail address : agungmumu090502@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di lembaga pendidikan formal, khususnya Madrasah Aliyah, memegang mandat fundamental dalam membentuk fondasi moral dan cara pandang keagamaan generasi muda. Dalam tatanan ideal yang diharapkan oleh otoritas pendidikan maupun prinsip dasar keberagaman di Indonesia, proses pembelajaran agama seharusnya menjadi persemaian nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman (M.Fikar et al., 2025). Hal ini diperkuat dengan berbagai regulasi nasional yang memposisikan cara pandang keagamaan yang moderat sebagai indikator utama keberhasilan pendidikan karakter. Oleh karena itu, sistem yang ada di madrasah, mulai dari manajemen kurikulum hingga mekanisme evaluasi harian, idealnya bergerak serempak untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut mendarah daging dalam diri setiap peserta didik.

Namun, realitas yang ditemukan di lingkungan pendidikan seringkali menunjukkan pemandangan yang kontras. Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2, terdapat sebuah jurang pemisah yang cukup lebar antara gagasan besar tentang keadilan beragama dengan apa yang benar-benar terjadi di dalam ruang kelas. Meskipun secara formal sekolah ini menjalankan kurikulum agama, internalisasi nilai-nilai keseimbangan tersebut tampak masih berjalan di permukaan saja. Tidak ditemukannya struktur yang jelas dalam menyisipkan pesan-pesan damai tersebut ke dalam rancangan pembelajaran membuat pelaksanaannya terkesan seadanya dan tidak terarah. Fenomena ini diperparah dengan kondisi di mana upaya penguatan karakter seringkali dianggap sebagai tugas sampingan yang tidak memiliki parameter keberhasilan yang pasti, sehingga tidak jarang pesan-pesan keagamaan disampaikan tanpa menyentuh esensi realitas sosial yang majemuk.

Secara teoretis, kegagalan dalam mengintegrasikan nilai substantif ke dalam praktik pendidikan berakar pada lemahnya tata kelola kualitas di tingkat internal. Penjaminan mutu dalam sebuah institusi pendidikan bukan sekadar urusan pemenuhan berkas fisik untuk kebutuhan akreditasi, melainkan sebuah siklus perbaikan yang harus menjamin setiap nilai yang dicita-citakan benar-benar terwujud dalam perilaku siswa (Sammara & Hasbi, 2023). Dalam perspektif manajemen, keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada sejauh mana standar tersebut ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkala. Di sinilah metode perbandingan kinerja atau evaluasi reflektif menjadi krusial. Dengan melakukan pemetaan posisi institusi terhadap standar yang lebih tinggi atau praktik terbaik di tempat lain, sebuah sekolah dapat menyadari kelemahannya secara objektif. Tanpa adanya proses refleksi yang terstruktur, madrasah cenderung merasa sudah berada di

jalur yang benar meskipun sebenarnya masih tertinggal jauh dalam hal inovasi pembelajaran dan penguatan karakter.

Penelitian mengenai penanaman nilai toleransi dan moderasi beragama di lingkungan pendidikan telah banyak dilakukan. Penelitian Permana & Riyani (2023) menitikberatkan pada aspek psikologis peserta didik dalam menyikapi perbedaan. Sedangkan penelitian (Hadisi et al., 2024) lebih menyoroti peran guru dalam mengelola pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama di kelas. Meskipun demikian, ketiga penelitian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek individual dan pedagogis, serta belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara sistem penjaminan mutu lembaga dengan efektivitas internalisasi nilai kedamaian beragama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah hubungan antara mekanisme penjaminan mutu internal dengan keberhasilan penanaman nilai kedamaian beragama dalam konteks kelembagaan.

Keunikan dan nilai baru yang ditawarkan dalam tulisan ini terletak pada usahanya untuk membedah isu keberagamaan melalui pintu masuk manajemen mutu. Penelitian ini tidak hanya berbicara mengenai apa yang diajarkan guru di depan kelas, tetapi lebih jauh menelisik mengapa sistem pendukung di tingkat madrasah belum mampu melahirkan lingkungan yang mendukung penguatan nilai tersebut secara sistemik. Dengan menempatkan proses evaluasi reflektif sebagai jantung analisis, kajian ini berhasil memetakan bahwa hambatan utama bukan hanya terletak pada materi ajar, melainkan pada kurangnya kapasitas sumber daya manusia akibat minimnya bimbingan teknis serta isolasi kelembagaan yang menutup diri dari kolaborasi luar. Penemuan mengenai fase perkembangan madrasah yang masih berada di tingkat awal dalam hal integrasi mutu nilai ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan model manajemen madrasah di masa depan.

Adapun fokus utama dari tulisan ini adalah untuk memaparkan secara mendalam bagaimana potret nyata dari penerapan nilai-nilai keseimbangan beragama dalam pembelajaran PAI di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2. Selain itu, kajian ini berupaya membongkar peran sistem penjaminan kualitas yang ada dalam mendukung atau justru menghambat proses tersebut. Melalui identifikasi faktor-faktor penghalang yang bersifat struktural dan teknis, penelitian ini bertujuan memberikan landasan objektif bagi madrasah untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Pada akhirnya, diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi titik balik bagi pengelola pendidikan untuk menyadari bahwa penanaman karakter tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada intuisi guru, melainkan harus dikawal oleh sistem penjaminan mutu yang terukur, inklusif, dan berbasis pada praktik-praktik unggul yang ada di dunia pendidikan modern. Dengan demikian, visi untuk melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dan bijak dalam beragama dapat benar-benar diwujudkan secara konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji fenomena manajemen mutu secara mendalam pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti kepala madrasah dan guru bidang studi, serta studi dokumentasi terhadap kurikulum dan instrumen penjaminan mutu yang diterapkan. Kombinasi teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik manajemen mutu yang berlangsung secara nyata di lapangan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika yang terjadi secara kontekstual sesuai dengan kondisi institusi yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna menguji konsistensi serta validitas informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif dan tabulasi, serta penarikan kesimpulan secara bertahap (Sugiyono, 2013). Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir. Selain itu, evaluasi dilakukan melalui teknik perbandingan kinerja untuk memetakan posisi institusi terhadap standar mutu yang diharapkan. Hasil dari proses ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2, diperoleh informasi bahwa nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi dan sikap saling menghargai telah dikenalkan dalam proses pembelajaran. Salah satu informan menyampaikan bahwa “nilai toleransi biasanya disampaikan saat ada materi tertentu atau ketika muncul peristiwa yang relevan di lingkungan siswa” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai moderasi masih bersifat situasional dan belum dirancang secara terencana. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa moderasi beragama belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain pembelajaran. Dalam perspektif teori kurikulum, nilai yang tidak direncanakan secara sistematis cenderung menjadi bagian dari hidden curriculum, sehingga sulit diukur tingkat keberhasilannya dalam membentuk sikap peserta didik (Gustira et al., 2025)

Temuan wawancara selanjutnya mengungkap bahwa guru belum memiliki perencanaan khusus

yang secara eksplisit memasukkan moderasi beragama ke dalam perangkat pembelajaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa “kami belum memasukkan secara khusus moderasi beragama dalam RPP atau modul ajar” (Wawancara Guru PAI, 2025). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa implementasi moderasi beragama masih bergantung pada inisiatif individu guru. Secara interpretatif, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam proses pembelajaran, karena tidak adanya standar yang sama dalam penyampaian nilai (Albina & Pratama, 2025). Dalam teori perencanaan pembelajaran, kejelasan tujuan dan indikator capaian menjadi hal yang penting agar proses pendidikan berjalan secara konsisten dan terarah.

Selain aspek perencanaan, hasil wawancara juga menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman guru terkait konsep moderasi beragama. Seorang informan menyatakan bahwa “kami belum pernah mendapatkan pelatihan khusus terkait moderasi beragama, jadi pemahaman kami masih umum saja” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kompetensi guru dalam mengimplementasikan moderasi beragama masih belum optimal. Secara interpretatif, keterbatasan tersebut menyebabkan guru cenderung menyampaikan moderasi hanya sebagai nilai moral umum, tanpa mengaitkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Dalam kerangka teori pendidikan transformatif, pembelajaran seharusnya mampu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan memahami realitas keberagaman secara mendalam, bukan sekadar menerima nilai secara normatif (Saputro, 2025).

Lebih lanjut, informan lain juga menyampaikan bahwa praktik pembelajaran moderasi beragama sangat bergantung pada pemahaman masing-masing guru. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa “cara menyampaikan moderasi di kelas berbeda-beda, tergantung pada guru masing-masing” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam implementasi pembelajaran, yang secara tidak langsung mencerminkan belum adanya standar baku di tingkat kelembagaan. Secara interpretatif, kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan peserta didik. Dalam teori manajemen pendidikan, keseragaman standar merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas pembelajaran agar tetap konsisten dan terkontrol (Khairi, 2025). Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa moderasi beragama belum menjadi bagian dari indikator utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Salah satu informan mengungkapkan bahwa “penilaian lebih banyak fokus pada administrasi dan hasil akademik siswa” (Wawancara Guru PAI, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa aspek nilai belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam proses evaluasi. Secara interpretatif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu masih berorientasi pada aspek formal dan belum menyentuh dimensi

substantif. Dalam teori manajemen mutu pendidikan, indikator penilaian seharusnya mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang agar pembentukan karakter peserta didik dapat berlangsung secara utuh (Lubis et al., 2026).

Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan program juga terlihat dari minimnya kerja sama dengan pihak eksternal (Hakim & Fitriani, 2024). Berdasarkan wawancara, belum terdapat program khusus yang melibatkan lembaga lain dalam penguatan moderasi beragama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan nilai moderasi masih bersifat internal dan belum didukung oleh jejaring yang lebih luas. Secara interpretatif, kurangnya kolaborasi ini dapat membatasi inovasi dalam pembelajaran. Dalam paradigma pendidikan modern, kerja sama antar lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik (Alamsyah et al., 2025).

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa implementasi moderasi beragama di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis. Nilai-nilai moderasi memang telah hadir dalam pembelajaran, namun belum terintegrasi secara menyeluruh dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan kompetensi guru, penyusunan kebijakan yang jelas, serta integrasi moderasi beragama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan secara lebih efektif dalam kehidupan peserta didik.

2. Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu dalam Mengawal Nilai Substantif Keberagamaan

Gambaran mengenai efektivitas sistem penjaminan mutu dalam mengawal nilai-nilai substantif keberagamaan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 menunjukkan bahwa orientasi mutu yang berjalan masih cenderung administratif. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menyebutkan bahwa “kegiatan penjaminan mutu lebih banyak berfokus pada kelengkapan administrasi pembelajaran dan hasil akademik siswa” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2025). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa aspek yang menjadi perhatian utama dalam sistem mutu masih berada pada hal-hal yang bersifat formal dan terukur secara teknis. Secara interpretatif, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keberagamaan sebagai dimensi substantif belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka evaluasi mutu. Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, sistem penjaminan mutu idealnya tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan nilai peserta didik (Malik & Bahrani, 2025).

Kondisi tersebut semakin terlihat ketika mencermati belum adanya indikator khusus yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi nilai keberagamaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa “belum ada instrumen penilaian yang secara khusus mengukur sikap moderasi atau nilai keberagamaan siswa” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada aspek kognitif dan belum menyentuh dimensi afektif secara mendalam. Secara interpretatif, ketiadaan indikator ini menyebabkan nilai-nilai keberagamaan tidak terpantau secara sistematis. Dalam teori evaluasi pendidikan, indikator yang jelas dan terukur merupakan prasyarat penting agar hasil penilaian dapat memberikan gambaran yang objektif serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Pendidikan (Zahroh & Hilmiyati, 2024).

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang berlangsung juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana refleksi untuk penguatan nilai. Hal ini tergambar dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa “kegiatan evaluasi biasanya dilakukan untuk memastikan administrasi berjalan dengan baik, bukan untuk menilai aspek nilai atau karakter siswa secara mendalam” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi masih bersifat prosedural. Secara interpretatif, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara fungsi ideal penjaminan mutu dengan praktik di lapangan. Dalam kerangka manajemen mutu berkelanjutan, evaluasi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk perbaikan berkelanjutan (Wiyani & Amalia, 2025).

Aspek koordinasi kelembagaan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas sistem penjaminan mutu. Hal ini terlihat dari pernyataan informan bahwa “belum ada koordinasi khusus yang membahas bagaimana moderasi beragama diintegrasikan dalam penilaian mutu” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara tim penjaminan mutu dan guru belum berjalan secara optimal. Secara interpretatif, kurangnya koordinasi ini berdampak pada tidak sinkronnya antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat kelembagaan dengan praktik pembelajaran di kelas. Dalam teori manajemen organisasi pendidikan, koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten (Afrianto et al., 2025).

Budaya mutu yang berkembang di madrasah juga menunjukkan kecenderungan yang masih berorientasi pada aspek administratif. Hal ini tergambar dari pernyataan informan bahwa “yang penting dokumen lengkap dan kegiatan berjalan sesuai jadwal” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa indikator keberhasilan masih dilihat dari kepatuhan

terhadap prosedur, bukan dari kualitas hasil pembelajaran secara substantif. Secara interpretatif, kondisi ini menandakan bahwa nilai keberagamaan belum menjadi bagian dari budaya mutu yang diinternalisasikan secara menyeluruh (Elpayuni et al., 2024). Dalam perspektif budaya mutu, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai inti lembaga dihidupkan dalam praktik sehari-hari.

Keterbatasan lain juga terlihat pada belum berkembangnya instrumen evaluasi yang mampu mengukur dimensi nilai secara komprehensif. Praktik penilaian yang ada masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang berfokus pada aspek kognitif (Ujiyanti & Hanif, 2025). Secara interpretatif, hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan pengukuran nilai-nilai afektif. Dalam teori penilaian autentik, evaluasi seharusnya dirancang untuk mampu mengukur sikap, nilai, dan keterampilan secara menyeluruh melalui pendekatan yang kontekstual dan beragam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas sistem penjaminan mutu dalam mengawal nilai substantif keberagamaan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 masih belum optimal. Sistem yang berjalan masih berorientasi pada aspek administratif dan belum mampu menjangkau dimensi nilai secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penjaminan mutu yang lebih komprehensif melalui pengembangan indikator nilai keberagamaan, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta inovasi dalam instrumen evaluasi. Dengan langkah tersebut, sistem penjaminan mutu diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat dan berkeadaban.

3. Faktor Struktural dan Kendala Penguatan Kompetensi Pedagogis Guru

Penguatan kompetensi pedagogis guru dalam konteks pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 menunjukkan adanya sejumlah kendala yang bersifat struktural. Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang menyebutkan bahwa “kesempatan untuk mengikuti pelatihan terkait pengembangan pembelajaran masih sangat terbatas dan belum merata bagi semua guru” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa akses terhadap peningkatan kapasitas profesional belum sepenuhnya difasilitasi secara optimal oleh lembaga. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia pendidikan, pelatihan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kompetensi pedagogis guru secara sistematis (Ramdani, 2025).

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh temuan bahwa program pengembangan profesional guru belum dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Informan mengungkapkan bahwa “kegiatan pelatihan biasanya bersifat insidental dan belum menjadi program rutin madrasah” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan kelembagaan. Secara interpretatif, hal ini menyebabkan tidak adanya kesinambungan dalam proses pengembangan kompetensi guru. Dalam teori manajemen pendidikan, pengembangan profesional yang efektif memerlukan perencanaan yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran (Munawir et al., 2025).

Selain keterbatasan pelatihan, kendala struktural juga terlihat dari minimnya dukungan kebijakan yang secara khusus mengarahkan penguatan kompetensi pedagogis guru. Hal ini tercermin dari pernyataan informan bahwa “belum ada kebijakan khusus yang mengatur pengembangan kompetensi guru secara terarah, terutama dalam konteks pembelajaran yang berbasis nilai” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi masih belum menjadi prioritas strategis di tingkat kelembagaan. Ketidadaan kebijakan ini berdampak pada tidak adanya pedoman yang jelas bagi guru dalam mengembangkan praktik pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam kerangka kebijakan pendidikan, regulasi yang jelas menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap program pengembangan berjalan secara terarah dan konsisten (Pratama et al., 2023).

Di sisi lain, keterbatasan dalam akses terhadap sumber belajar dan referensi juga menjadi kendala dalam penguatan kompetensi pedagogis. Berdasarkan wawancara, guru masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh bahan ajar yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan fasilitas pembelajaran belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan sumber belajar ini dapat menghambat kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Dalam teori pembelajaran modern, ketersediaan sumber belajar yang beragam merupakan faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna (Fitri & Agustandi, 2023).

Selain faktor internal lembaga, kendala juga muncul dari terbatasnya jejaring kerja sama dengan pihak eksternal dalam pengembangan kompetensi guru (Kasmawati, 2020). Informan menyatakan bahwa “kerja sama dengan lembaga lain dalam hal pelatihan atau pengembangan guru masih sangat minim” (Wawancara Guru PAI, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa peluang untuk belajar dari praktik terbaik di luar lembaga belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya kolaborasi ini

berdampak pada terbatasnya wawasan dan pengalaman guru dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dalam perspektif pendidikan kolaboratif, kerja sama antar lembaga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Jika dianalisis secara menyeluruh, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi pedagogis guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh struktur kelembagaan yang melingkupinya. Keterbatasan pelatihan, minimnya kebijakan, tingginya beban administratif, serta kurangnya akses terhadap sumber belajar dan jejaring kolaborasi merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang kurang mendukung pengembangan profesional guru. Dalam teori sistem pendidikan, kualitas pembelajaran merupakan hasil dari interaksi berbagai komponen yang saling memengaruhi, sehingga perbaikan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi (Fatimah et al., 2024).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penguatan kompetensi pedagogis guru di Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak. Diperlukan langkah strategis berupa penyusunan program pelatihan yang berkelanjutan, penguatan kebijakan kelembagaan, penataan beban kerja guru, serta pengembangan kerja sama dengan pihak eksternal. Melalui upaya tersebut, diharapkan kompetensi pedagogis guru dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.

4. Pemetaan Posisi Mutu dan Strategi Perbaikan Melalui Instrumen Refleksi Kelembagaan

Berangkat dari temuan empiris pada pembahasan sebelumnya, bagian ini diarahkan untuk memetakan posisi kelembagaan sekaligus merumuskan langkah strategis perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Pemetaan ini penting agar arah penguatan moderasi beragama tidak berhenti pada tataran kesadaran normatif, tetapi dapat ditransformasikan menjadi sistem yang terstruktur. Dalam konteks ini, Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 dapat dikategorikan berada pada tahap awal pengembangan, yaitu fase ketika institusi mulai menyadari pentingnya integrasi nilai, namun belum sepenuhnya memiliki perangkat sistemik yang mapan untuk mengelolanya secara konsisten. Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan informan yang mengungkapkan bahwa “secara umum nilai moderasi sudah sering disampaikan, tetapi belum ada sistem khusus yang mengaturnya secara menyeluruh” (Wawancara Wakil Kepala Madrasah, 2026). Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran konseptual dan kesiapan struktural lembaga.

Jika ditelaah lebih lanjut, posisi awal pengembangan ini bukan merupakan kelemahan, melainkan titik pijak strategis untuk melakukan pembenahan berbasis kebutuhan nyata. Dalam perspektif manajemen strategis dan benchmarking pendidikan, identifikasi posisi awal justru menjadi instrumen refleksi yang krusial untuk menentukan prioritas intervensi (Zakiyah & Prayitna, 2025). Hal ini diperkuat oleh temuan lapangan yang menunjukkan bahwa praktik penjaminan mutu yang berjalan saat ini masih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Seorang informan menyatakan bahwa “penilaian mutu lebih banyak dilihat dari kelengkapan perangkat dan laporan, belum sampai pada perubahan sikap atau perilaku siswa” (Wawancara Tim Penjamin Mutu, 2026). Temuan ini mengindikasikan bahwa indikator mutu yang digunakan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi substantif keberagamaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi perbaikan pertama yang mendesak adalah melakukan rekayasa ulang terhadap instrumen penjaminan mutu internal dengan memasukkan indikator afektif dan perilaku sebagai bagian dari capaian mutu. Artinya, madrasah perlu merumuskan indikator kinerja utama yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam menunjukkan sikap toleransi, empati, dan kemampuan resolusi konflik (Putra et al., 2021). Kebutuhan ini sejalan dengan pengakuan informan yang menyebutkan bahwa “selama ini belum ada ukuran yang jelas untuk menilai sikap moderat siswa, jadi guru hanya menilai secara umum saja” (Wawancara Guru PAI, 2026). Dengan demikian, perubahan indikator ini akan mendorong terjadinya pergeseran paradigma penilaian dari sekadar formalitas menuju pengukuran yang lebih bermakna dan terarah.

Strategi perbaikan perlu menasar pada penguatan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis, namun dalam konteks ini ditekankan sebagai tindak lanjut dari kebutuhan sistem, bukan sekadar pengembangan individu (Zulwiddi & Iswantir, 2023). Data lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis dalam mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam perangkat pembelajaran masih menjadi kendala. Hal ini tergambar dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa “kami sebenarnya paham konsepnya, tapi kadang bingung bagaimana menuangkannya secara tertulis di RPP atau modul ajar” (Wawancara Guru, 2026). Oleh karena itu, madrasah perlu merancang program pengembangan profesional yang berbasis kebutuhan riil, seperti forum diskusi tematik atau komunitas belajar internal yang fokus pada praktik integrasi nilai dalam pembelajaran. Upaya ini bukan sekadar meningkatkan kompetensi, tetapi juga memastikan adanya keseragaman pemahaman di antara tenaga pendidik.

Penguatan tidak dapat hanya bertumpu pada kapasitas internal, melainkan juga membutuhkan keterbukaan terhadap jejaring eksternal sebagai sumber inovasi (Imannisa & Ulfadhillah, 2026). Temuan penelitian menunjukkan bahwa minimnya interaksi dengan lembaga lain menjadi salah satu faktor yang membatasi perkembangan program. Seorang informan mengungkapkan bahwa “selama ini kami jarang melakukan kerja sama atau studi banding, sehingga referensi program masih terbatas” (Wawancara Kepala Madrasah, 2026). Kondisi ini mengisyaratkan pentingnya strategi kolaboratif melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan lain atau institusi keagamaan yang memiliki praktik baik dalam pengelolaan moderasi beragama. Melalui mekanisme berbagi pengalaman dan evaluasi silang, madrasah dapat memperoleh inspirasi sekaligus umpan balik objektif terhadap kualitas program yang dijalankan.

Secara manajerial, seluruh langkah strategis tersebut perlu dipayungi oleh kebijakan kelembagaan yang jelas dan operasional. Ketiadaan regulasi internal yang spesifik berpotensi membuat berbagai inisiatif berjalan secara sporadis dan tidak berkelanjutan (Ismail et al., 2026). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa “belum ada aturan khusus yang mengatur secara detail tentang moderasi beragama di madrasah, jadi masih tergantung pada inisiatif masing-masing guru” (Wawancara Staf Kurikulum, 2026). Oleh karena itu, penyusunan standar operasional prosedur yang mengatur integrasi nilai moderasi dalam seluruh aspek kehidupan madrasah menjadi langkah krusial. Kebijakan ini akan berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat kontrol untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dalam kerangka yang sama.

Dengan demikian, melalui pemetaan posisi kelembagaan yang berbasis data empiris serta perumusan strategi perbaikan yang terarah, Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 memiliki peluang besar untuk berkembang menuju tahap yang lebih matang. Transformasi ini menuntut komitmen kolektif, konsistensi implementasi, serta keberanian untuk melakukan evaluasi berkelanjutan. Apabila langkah-langkah strategis tersebut dijalankan secara sistematis, maka integrasi moderasi beragama tidak hanya akan menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam sistem pendidikan dan budaya kelembagaan secara menyeluruh. *asus Mark-Up Invoice Proyek (Kasus 9 & Kasus 10).*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa Madrasah Aliyah Hidayatul Muslimin 2 masih berada pada tahap awal pengembangan dalam mengintegrasikan

moderasi beragama ke dalam sistem penjaminan mutu, yang ditandai oleh adanya kesenjangan antara kesadaran konseptual dan kesiapan struktural kelembagaan. Temuan empiris menunjukkan bahwa orientasi mutu masih didominasi oleh aspek administratif, sementara dimensi substantif berupa pembentukan sikap moderat belum terformulasi secara sistematis dalam indikator kinerja. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas teknis guru dalam mengoperasionalkan nilai moderasi serta minimnya jejaring kolaboratif eksternal turut menjadi faktor penghambat optimalisasi program. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang meliputi rekonstruksi indikator mutu berbasis afektif, penguatan kapasitas sumber daya manusia secara terarah, perluasan kemitraan kelembagaan, serta penyusunan kebijakan internal yang operasional dan berkelanjutan. Melalui upaya tersebut, integrasi moderasi beragama diharapkan tidak lagi bersifat normatif, melainkan berkembang menjadi sistem yang terstruktur, terukur, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara holistik dalam konteks keberagaman.

DAFTAR REFERENSI

- Afrianto, Agustina, D., Agustian, K., & Olyvia, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(4), 309–317.
- Alamsyah, A. C., Nadiva, Z., Adhiputranto, J., & Azis, A. (2025). Inovasi Dan Kolaborasi Di Bidang Pendidikan Dalam Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 4(1), 97–100.
- Albina, M., & Pratama, K. B. (2025). Peran Tujuan Pembelajaran dalam Perencanaan Pembelajaran : Dasar untuk Pembelajaran yang Efektif. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 55–61.
- Elpayuni, N., Fitri, T. A., & Bedi, F. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama dan Karakter dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(04), 895–905.
- Fatimah, U., Manik, A., Nadeak, P. E., & Yunita, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Profesi Guru di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(3), 107–115.
- Fitri, S., & Agustandi, E. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Sains Berbasis Kontekstual pada Materi Sumber Energi Kelas III Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 11705–11713.

- Gustira, B. A., Montessori, M., Indrawadi, J., & Tiara, M. (2025). Hidden Curriculum pembinaan toleransi dan kepedulian pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(3), 499–507.
- Hadisi, L., Tetambe, A. G., & Assingkily, M. S. (2024). Implementasi Peran Guru PAI dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Siswa. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1895–1902.
- Hakim, L., & Fitriani, M. I. (2024). Synergy through construction: Co-designing of special education program with stakeholders in the school. *International Journal of Special Education and Information Technologies*, 10(1), 70–78.
- Imannisa, M. A., & Ulfadhillah, F. N. (2026). Implementasi Open Innovation Berbasis Platform Digital Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Inovatif Pada Industri Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin*, 4(1), 1–8.
- Ismail, S., Buata, D. A., & Noholo, S. (2026). Sistem Pengendalian Internal dalam Tata Kelola Organisasi: Tinjauan Literatur tentang Peran Strategis dan Kepatuhan. *YUME : Journal of Management*, 9(1), 920–925.
- Kasmawati, Y. (2020). Peningkatan Kompetensi Melalui Kolaborasi : Suatu Tinjauan Teoritis Terhadap Guru. *Equilibrium : Jurnal Pendidikan*, VIII(2), 136–142.
- Khairi, A. F. (2025). Sistem kualitas dan standar penjaminan kualitas lembaga pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 6(3), 288–298. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v6i3.17245>
- Lubis, R., Hsb, A. A. A., Syahirah, E., Hakim, E. H., Alga, R. K., & Azhara, S. (2026). Implikasi Perkembangan Afektif , Kognitif , Psikomotorik , Moral dan Spiritual dalam Pembelajaran Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 1379–1386.
- M.Fikar, Putra, R., Julhadi, & Wahyuni, S. (2025). Komprehensif Pendidikan Toleransi dalam Islam. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 234–244.
- Malik, N. N., & Bahrani. (2025). Evaluasi dan Audit Mutu Pendidikan dalam Perspektif Manajemen Mutu Terpadu. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 354–358.
- Munawir, Yani, F. P., & Az-zahra, E. A. (2025). Pengembangan profesionalisme guru melalui pendidikan berkelanjutan : Sebuah kajian literatur Pendahuluan. *Indonesian Journal of Learning and Educational Studies*, 3(1), 14–26.
- Permana, M. Z., & Riyani, P. (2023). Toleransi Sebuah Konsep Psikologi. *Jurnal Toleransi*, 15(2), 93–103.

- Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan. JOPPAS: Journal Of Public Policy And Administration Silampari, 1(1), 122–127.
- Putra, P., Suhartini, & Arnadi. (2021). Internalisasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Nilai Karakter Dan Budaya Bangsa Di Sekolah Dasar Negeri. AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 8(2), 232–241.
- Ramdani, F. (2025). Pengaruh Pelatihan Berkelanjutan terhadap Kompetensi Guru di Era IA. JKP: Jurnal Khasanah Pendidikan, 3(3), 78–84.
- Sammara, R., & Hasbi. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Journal of Islamic Education Management, 8(1), 45–58.
- Saputro, J. D. (2025). Jack Mezirow's Transformative Learning on The Dimension Of Critical Thinking and Digital Literacy: A Needs Analysis Study. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, VI(1), 158–175.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (A. CV (ed.)). Alfabeta CV.
- Ujiyanti, L. N., & Hanif, M. (2025). Evaluasi Aspek Afektif , Kognitif , Psikomotorik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam : di SMP Negeri 3 Kedungbanteng. IQRO: Journal of Islamic Education, 8(1), 319–331.
- Wiyani, N. A., & Amalia, R. R. (2025). Manajemen Program Evaluasi Pekatan untuk Mengaktualisasikan Prinsip Continuous Improvement dalam Mengembangkan Kualitas Pembelajaran PAUD. JEA (Jurnal Edukasi AUD), 11(2), 125–141. <https://doi.org/10.18592/jea.v11i2.17889>
- Zahroh, F. L., & Hilmiyati, F. (2024). Indikator Keberhasilan dalam Evaluasi Program Pendidikan. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 4(3), 1052–1063. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03>.
- Zakiyah, N., & Prayitna, J. (2025). Implementasi Pengimbasan Kurikulum Merdeka Melalui Benchmarking. Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 395–408.
- Zulwiddi, N., & Iswantir, M. (2023). Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2(1), 16–27.